RELOKASI, BAGIAN DARI REVITALISASI

Wajah Baru Malioboro, Harapan Baru

MALIOBORO sebagai jantung Kota Yogyakarta kini memasuki babak baru, dengan wajah dan tampilan baru, yang tentu saja disertai harapan baru dari seluruh masyarakat Malioboro maupun warga DIY umumnya, yakni Malioboro yang semakin ramah, nyaman, aman, menarik, manusiawi, berbudaya, *ngrejekeni*, sekaligus tetap memegang teguh filosofi yang terkandung di kawasan tersebut.

Relokasi atau pemindahan pedagang kakilima (PKL) Malioboro yang mulai dilakukan saat ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya revitalisasi atau penataan kembali kawasan Malioboro. Hal itu terkaitan keputusan Pemda DIY untuk mengusulkan Sumbu Imajiner yang sarat makna filosofi tersebut menuju warisan budaya dunia. Usulan tersebut sudah diajukan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui UNESCO sejak 2019.

Sumbu Imajiner atau bentang garis dari Laut Selatan, Panggung Krapyak, Kraton Yogyakarta, Malioboro, Tugu Yogyakarta hingga Gunung Merapi merupakan tata ruang Yogyakarta. Selain itu, Sumbu Imajiner atau Sumbu Filosofi itu juga melambangkan konsep Manunggaling Kawula Gusti yang memiliki filosofi keselarasan, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan jagad seisinya.

"Relokasi PKL dilakukan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penataan kawasan Malioboro dalam menyongsong diakuinya Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO. Dalam relokasi PKL ini kami menyiapkan dua tempat yaitu di eks Gedung Bioskop Indra yang sekarang bernama Teras Malioboro 1 dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY (Teras Malioboro 2). Adapun jumlah PKL yang yang terdata akan dipindahkan ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 ada 1.838 PKL," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji MM kepada *KR* di Kepatihan, Yogyakarta, pekan kemarin.

Disampaikan, revitalisasi kawasan Malioboro tidak semata-mata secara fisik akan mengubah tatanan yang ada. Tetapi tatanan yang baru itu justru akan lebih mengutamakan pada satu kearifan lokal, keadilan, kenyamanan hidup, kehidupan dan penghidupan semua pelaku usaha maupun masyarakat luas yang biasanya mengapresiasi kawasan Malioboro.

Baskara Aji mengatakan, relokasi PKL Malioboro selain bisa memberikan kepastian tempat usaha bagi para PKL, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta akan mengupayakan agar Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dikenal luas wisatawan. Salah satunya dengan memasang rambu-rambu informasi menuju dua spot berbelanja baru tersebut. Hal itu supaya wisatawan dengan mudah bisa menemukan lokasi para PKL berjualan. Untuk itu pihaknya meminta kepada para pedagang untuk tidak perlu terlalu khawatir.

"Saya kira menjadi tugas pengelola dalam hal ini Diskop UKM dan pengelola Malioboro untuk bisa memberikan informasi yang jelas di masyarakat terkait adanya relokasi. Supaya mereka bisa tahu di mana mereka bisa belanja. Adapun soal adanya kekhawatiran pedagang bakal kalah bersaing dengan pedagang di Pasar Beringharjo, saya kira sebelum adanya relokasi, seluruh pedagang di kawasan Malioboro pun sudah terjadi persaingan," terang Baskara Aji.

Jalur Pedestrian

Menurut Baskara Aji, upaya penataan perlu dilakukan karena selasar Malioboro seharusnya tidak dipergunakan PKL untuk berjualan. Karena, selasar atau lorong-lorong pertokoan sebenarnya dimiliki oleh pemilik toko dan Pemda DIY. Untuk itu relokasi harus dilakukan, karena hal itu merupakan jalur pedestrian Malioboro, bukan milik PKL. Untuk itu, setelah dilakukan pemindahan PKL akan dijaga bangun sepanjang Malioboro.

Salah satu caranya dengan diperindah dan dikembalikan kepada yang seharusnya. Seperti dibersihkan dari sampah-sampah visual. Adapun untuk pengembalian fasad-fasad sisi luar dari toko-toko sambil jalan juga akan dilakukan. Walaupun sebetulnya untuk fasad di toko-toko itu sebagian besar hanya tertutup baliho.

Karena dari hasil kajian dan identifikasi Dinas Kebudayaan DIY, sebagian besar atau lebih bangunan di kawasan Malioboro masuk kategori cagar budaya. Sedangkan bangunan modern atau noncagar budaya tetap akan dibuat selaras dan serasi supaya tidak menjadi bangunan asing di antara bangunan yang lain.

Ketua Paguyuban PKL Tri Dharma Rudiyarto menyatakan, awalnya pihaknya berharap keberadaan PKL bisa menjadi bagian dari ikon pariwisata Malioboro. Tapi akhirnya pihaknya bisa memahami. Semua itu berangkat dari konsep pedestrian kawasan Malioboro atau revitalisasi dari Tugu sampai Panggung Krapyak. Di mana sosialisasi konsep besar relokasi PKL sudah dimulai sejak 2014, bahkan sebelum munculnya kawasan pedestrian di sisi Timur Malioboro.

Para PKL pada dasarnya bisa menerima pemindahan tersebut. Mereka berharap relokasi dilakukan terhadap semua pedagang tanpa terkecuali dan lokasi sebelumnya tidak digunakan oleh pedagang-pedagang baru, pemilik toko, atau pemodal besar. Tempat relokasi juga diharapkan memiliki kelayakan usaha, daya tampung, mampu menunjang keberlanjutan usaha, dan didukung promosi oleh Pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi bisa tetap berlanjut, bahkan meningkat.

"Saat sosialisasi sudah tersirat dalam gambar desain tersebut suatu saat PKL Malioboro akan berpindah dari Malioboro. Tapi masih tetap berada di kawasan Malioboro. Akhirnya kami menerima dengan syarat dan menjadi pertimbangan-pertimbangan Pemerintah dalam melaksanakan tahapan-tahapan relokasi," terang Ketua Paguyuban PKL dengan jumlah anggota terbesar itu.

Rudiyarto berharap, setelah relokasi ke tempat yang baru kunjungan bisa meningkat. "Jadi memang untuk kebaikan kita agar bisa lebih baik. Baik mengenai legalitas, kepastian usaha dan sebagainya karena selama ini bukan salah waktu tapi posisinya salah tempat. Salah waktu karena sudah jualan di sini selama berpuluh-puluh tahun. Tapi setelah tahu legalitasnya ternyata tempat ini milik orang, bukan milik Pemda.

"Saya titip pesan kepada Pemerintah, tolong ada keberpihakan kepada ekonomi kecil. Apabila menemui masalah di shelter baru atau sementara Pemerintah segera bertindak sebelum terjadi masalah sosial yang berat," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Paguyuban PKL Pelmani Slamet Santoso. Selaku PKL Malioboro, Slamet mengaku pernah diundang Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta terkait rencana relokasi PKL Malioboro. Setelah menerima sosialisasi dari Disbud Kota langsung disosialisasikan ke anggotanya. Secara garis besar anggotanya bisa memahami Program Pemkot Yogya dan Pemda DIY. Pihaknya sadar selama ini menempati tempat yang tidak memiliki legalitas (hak kepemilikan). Karena ruang yang mereka tempati milik toko.

"Menempati tempat yang baru itu tidak gampang atau tidak mudah dalam artian membutuhkan waktu untuk menciptakan pasar yang baru. Untuk itu kami berharap kepada Pemerintah melalui dinas terkait bisa ada sinergi supaya di tempat yang baru banyak kunjungan wisatawan. Dengan cara memberikan promosi atau memasarkan kepada para wisatawan termasuk masyarakat umum," imbuhnya.

Slamet Santoso menambahkan, anggota paguyuban juga cukup memahami dan bisa menerima untuk berpindah ke tempat yang lebih terjamin legalitasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menyampaikan, para PKL akan mendapatkan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik, air, internet, tempat sampah serta diberikan lapak gratis di tempat baru.

"Tidak hanya sekadar menyediakan dan memfasilitasi PKL, kami tentu akan melakukan pembinaan sampai fasilitasi gratis ongkos kirim (ongkir) yang sedang dalam proses. Kami akan membantu pemasaran PKL di era transformasi digital dengan penjualan secara online, asal ada komitmen bersama baik Pemerintah maupun pengelola," tuturnya.

Siwi mengakui, telah ada kesepakatan bersama bahwa tempat ini merupakan ruang usaha bagi para PKL yang selama ini menempati sepanjang Malioboro. Konsep lapaknya pun bervariasi sudah diatur sedemikian rupa baik untuk memajang (display) produk dan tempat penyimpanan. Masyarakat maupun wisatawan akan lebih nyaman berbelanja oleh-oleh baik kerajinan, fashion dan kuliner. Sehingga hadirnya gedung tiga lantai (Teras 1 Malioboro) akan lebih memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Tidak hanya pengunjung tetapi juga pelaku usaha itu sendiri serta perlindungan bagi konsumen. Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi ke depannya.

Para PKL Malioboro mulai boyongan ke tempat relokasi pada Selasa (1/2), menempati Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Sebagai pedagang, harapan para PKL tidak muluk-muluk, karena yang terpenting dagangan bisa laku.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti mengatakan, para PKL sudah diperkenankan berjualan di lapak baru Teras Malioboro. Ada sekitar 1.040 PKL penjual aksesoris dan kuliner lesehan di Malioboro yang bakal menempati Teras Malioboro 2. Dalam seminggu, semua PKL Malioboro diharapkan sudah beralih ke tempat baru. Karena pada 8 Februari harus sudah bersih semua.

"Setelah semua PKL menempati lapak barunya, Pemkot Yogyakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi. Termasuk praktik jual beli lapak yang dimungkinkan terjadi. Kami ada kontrol, memang sudah kerja sama dengan pedagang. Kalau ada yang jual (lapak) nanti kami evaluasi terus. Semua itu untuk memastikan tidak boleh ada yang berpindah tangan, mengingat semua itu merupakan aset negara," tandas Yetti Martanti.

(Riyana Ekawati)

PKL mulai menempati Teras Malioboro. KR-Franz Boedisukarnanto

PKL Malioboro di tempat baru. KR-Franz Boedisukarnanto

WISATA

WISATA RELIGI DI KOTA KUDUS

Kota Santri yang Tetap Menjaga Toleransi

AKULTURASI Islam dan Hindu terwujud dengan cantik di Kota Kudus, Jawa Tengah, sejak berabad silam. Yang menarik, selama ini orang melihat lebih pada bangunan Masjid Al Aqsa Manarat Qudus atau Masjid Menara Kudus saja. Padahal toleransi itu juga tampak dalam peninggalan lain. Masjid, kelenteng tua bahkan juga dalam kuliner. Layak jika Kudus disebut kota santri yang penuh dan tetap menjaga toleransi.

Semua berkat ajakan dan nasihat Sunan Kudus untuk selalu menghormati masyarakat pemeluk Hindu, kepercayaan yang sudah ada sebelumnya dan dipeluk masyarakat Kudus waktu itu. Meski Sunan Kudus, pemilik nama Sayid Ja'far Shadiq Azmatkhan adalah seorang tokoh Walisanga penyebar Agama Islam di Jawa tahun 1549 Masehi, dan selalu mengajarkan penghormatan kepada pemeluk agama sebelumnya.

Lawang Kembar

Dari sekian banyak tempat wisata religi di Kudus, Masjid Al Aqsa Manarat Qudus yang dibangun 1549 Masehi menjadi tujuan utama. Masjid yang dibangun Sunan Kudus ini spesifik dengan menara berwujud pura dan 'pintu kembar' yang berada di masjid. Sementara beberapa masjid lain seperti Masjid Loram, Masjid Nganguk Wali dan Masjid Jepang memiliki gapura berbentuk pura yang dilindungi sebagai cagar budaya. Loram merupakan desa wisata yang tertata apik bahkan pagar rumah sekitar masjid pun menyesuaikan. "Kawasan ini tertata rapih, bahkan warga membuat pagar rumah pun menyesuaikan. Jadi indah," ungkap Andi dan Pujiati, wisatawan dari Magelang.

Upaya Sunan Kudus dimaksudkan agar tidak berkonfrontasi dengan masyarakat sekitar, ketika membangun masjid Al Aqsa Manarat Qudus. Maka arsitektur masjid pun memadukan konsep budaya Islam, Hindu dan Budha. Sederhana tujuannya. Agar pemeluk selain Islam tidak merasa asing untuk masuk ke kawasan tersebut. "Menara berbentuk pura memang dibangun bersamaan dengan masjid. Masjid Menara itu dulu kecil, 9x9 meter. Dan *lawang kembar* itu dulu berada di luar masjid. Perluasan masjid tahun 1919 yang membuat gapura dalam masuk masjid. Dan perluasan 1933 menjadikan gapura luar berada di dalam masjid," ungkap Dosen FTSP UII Dr Revianto.

Lawang kembar tentu menjadi kekhasan dan keunikan tersendiri dari Masjid Al Aqsa. Selain *lawang kembar*, keunikan Masjid Al Aqsa terdapat pada Menara berbentuk pura, Gapura Paduraksa 'Arya Penangsang' serta kompleks makam Sunan Kudus. "Gapura Paduraksa Arya Penangsang ini yang ditakuti pejabat. Konon di situ ada Rajah Kalacakra yang membuat pejabat yang lewat bisa terpental," jelas Revianto.

Mengapa disebut Gapura 'Arya Penangsang', menurutnya karena tokoh Jipang ini merupakan murid kesayangan Sunan Kudus. Entah benar atau tidak, yang pasti memang untuk memasuki kawasan makam Sunan Kudus, para pejabat memilih jalan lain.

Sementara di Masjid Loram menurut warga Kudus, Empu Santoso selain masih menjaga kelestarian gapura, juga ada tradisi *manten mubeng gapura* yang masih dilakukan warga Ngloram. "Jadi pengantin usai melaksanakan akad nikah, datang ke Masjid Ngloram dan *ngubengi* gapura ini," jelas Empu Santoso.

Kelenteng

Dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan frontal terhadap adat dan kebiasaan masyarakat. Selain membangun tempat ibadah juga membuat nyaman masyarakat yang mayoritas Hindu, Sunan Kudus juga mengingatkan pengikut untuk tidak menyembelih sapi. Hasanu Simon dalam 'Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa' menyebut bahwa Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena hal itu akan melukai pemeluk Hindu, agama mayoritas penduduk Kudus waktu itu. "Sebagai ganti, Sunan Kudus menyembelih kerbau," tulis Hasanu Simon.

Kini sebagian besar warga Kota Kudus adalah Muslim. Namun tradisi tidak menyembelih sapi tetap dilaksanakan. Warga kota santri yang juga menyandang gelar kota kretek ini hingga sekarang juga tetap berdampingan baik dengan masyarakat beragama lain. Terbukti, sekitar 300 meter dari Masjid Menara terdapat kelenteng tua, Kelenteng Hok Ling Bio, yang didirikan Abad XV. Menurut referensi yang ada, bangunan kelenteng ini lebih tua atau lebih dulu dibanding menara Kudus.

(Fadmi Sustiwi)

KR-Fadmi Sustiwi

Masjid Al Aqsa Manarat Qudus lengkap dengan Menara dan Gapura Paduraksa 'Arya Penangsang'

Kelenteng Hok Ling Bio, sekitar 350 meter dari Masjid Al Aqsa. KR-Fadmi Sustiwi

'Lawang Kembar' di serambi masjid. KR-Fadmi Sustiwi

Grafis : Arko